

ANALISIS KECENDERUNGAN GEOPOLITIK INDONESIA DALAM ORGANISASI BRICS PADA PERSPEKTIF POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Ragilia Dwi Pradita¹⁾, Najwa Adhwa Ramadhani²⁾, Alifah Jasmine Kallista Remanu³⁾, Jerry Indrawan⁴⁾, Reja⁵⁾

^{1) 2) 3) 4) 5)} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

e-mail : 2310413025@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾, 2310413051@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾,
2310413061@mahasiswa.upnvj.ac.id³⁾, jerry.indrawan@upnvj.ac.id⁴⁾, reja@upnvj.ac.id⁵⁾

Received: 11-04-2026

Revised: 26-05-2026

Accepted: 22-06-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: BRICS,
Geopolitics, Global, Free
Active, Indonesia.

Kata Kunci: BRICS,
Geopolitik, Global, Bebas
Aktif, Indonesia.

BRICS is an organization comprising a coalition of countries, namely Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The countries in the BRICS coalition account for approximately 40% of the world's population and hold a significant share of the global economy. Indonesia's accession to BRICS could enhance its influence in regional dynamics and the political landscape and enable it to play a more prominent role in the global economy. However, this would inevitably clash with the concept of free and active foreign policy that Indonesia has long embraced. This study aims to analyze Indonesia's free and active foreign policy concept, which continues to be implemented amidst the country's growing involvement in the BRICS organization. The method employed in this study is a qualitative approach, which is understood as a means to uncover deeper meanings regarding social phenomena. The findings of this study indicate that Indonesia's role within BRICS is viewed as a form of economic diplomacy and a short-term geopolitical strategy. Indonesia's membership in BRICS also demonstrates an interest in expanding global influence in the economic sphere; however, by upholding the principle of a free and active foreign policy that remains non-aligned with any single nation, Indonesia maintains strategic flexibility and avoids excessive commitment to a single bloc. Therefore, Indonesia's membership in BRICS can provide an opportunity to moderate the stance of more confrontational groups and facilitate dialogue between BRICS and Western nations.

Abstrak.

BRICS adalah sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa koalisi negara yakni Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Negara-negara yang tergabung dalam koalisi BRICS telah mewakili sekitar 40% populasi dunia yang memiliki pangsa signifikan dalam sektor ekonomi global. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat meningkatkan pengaruh dalam dinamika regional serta lanskap politik dan memainkan peran yang lebih menonjol dalam perekonomian global. Namun, hal ini tentunya akan bersinggungan dengan konsep politik bebas aktif yang telah dianut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tetap dijalankan di tengah kecenderungan Indonesia dalam organisasi BRICS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif, di mana metode yang dipahami untuk mencari makna mendalam mengenai fenomena sosial. Temuan dari penelitian ini bahwa Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai diplomasi ekonomi politik dan strategi geopolitik jangka pendek. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga menunjukkan bahwa adanya minat dalam memperluas pengaruh global dalam ekonomi, namun dengan memegang prinsip politik bebas aktif yang tidak memihak oleh negara manapun, Indonesia mempertahankan fleksibilitas strategis dan

menghindari komitmen berlebihan dalam satu blok tunggal. Oleh karena itu, dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS dapat memberikan kesempatan untuk memoderasi sikap kelompok yang lebih konfrontatif dan memfasilitasi dialog antara BRICS dan negara-negara Barat.

PENDAHULUAN

Ekonomi merujuk pada serangkaian produksi dan konsumsi yang saling berkaitan dengan adanya aktivitas dalam penentuan distribusi sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, suatu negara dapat melakukan evaluasi terhadap ekonomi suatu negara melalui berbagai indikator, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, juga tingkat inflasi.¹ Pada negara Indonesia sendiri, menjadi negara maju adalah tujuan yang terus diupayakan oleh bangsa ini untuk dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup warganya, meskipun banyak menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan perekonomian terbesar di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran signifikan dalam politik dan perekonomian global. Dalam hal ini, Indonesia telah menghadapi dinamika ekonomi yang cukup signifikan antara tahun 2019 dan tahun 2024. Tahun tersebut ditandai berbagai macam tantangan global yang dihadapi, mulai dari pandemi Covid-19, gangguan rantai pasokan internasional, hingga komoditas fluktuasi harga.² Padahal, pada tahun 2019 tepatnya sebelum pandemi melanda, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5.02% yang mencerminkan stabilitas ekonomi domestik.³

Kemajuan ekonomi suatu bangsa tidak diragukan lagi dengan adanya faktor ekonomi global. Dalam hal ini, interaksi ekonomi secara internasional dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi masing-masing negara. Melihat bangsa Indonesia, pembangunannya berfokus pada sektor ekonomi yang berguna sebagai kunci kemakmuran bangsa dan negara sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan perluasan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, yang faktor tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat.⁴ Jika perekonomian suatu negara dapat tumbuh secara signifikan, maka akan terjadi pula perubahan pada bidang lainnya untuk kemajuan bangsa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga diperlukan guna meningkatkan produktivitas suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia

¹ Alia Rahmatulummah dkk, "Opportunities To Advance Indonesia's Economy Through the OECD and BRICS", *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* Vol. 3, No. 1 (2025): 65-95.

² Alia Rahmatulummah dkk, "Opportunities To Advance Indonesia's Economy Through the OECD and BRICS", *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* Vol. 3, No. 1 (2025): 65-95.

³ Asian Development Bank, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Menguat Pada 2022, 2023 — ADB", *Asian Development Bank*, 6 April 2022, <https://www.adb.org/id/news/indonesia-economic-growth-strengthen-2022-2023-adb>

⁴ Alia Rahmatulummah dkk, "Opportunities To Advance Indonesia's Economy Through the OECD and BRICS", *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* Vol. 3, No. 1 (2025): 65-95.

turut aktif dan semakin terbuka terhadap keterlibatan Indonesia dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui organisasi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan minat yang semakin besar untuk bergabung dengan BRICS. BRICS adalah sebuah koalisi negara-negara berkembang utama yang terdiri atas Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yang diinisiasi oleh Rusia. Negara-negara yang tergabung dalam BRICS telah mewakili sekitar 40% populasi dunia yang memiliki pangsa yang signifikan dalam perekonomian global, juga berfungsi sebagai wadah dalam mendorong reformasi lembaga keuangan internasional dan melakukan promosi kerja sama Selatan-Selatan atau South south Cooperation.⁵ Dengan Ambisi dalam mengambil langkah ini sejalan dengan tujuan Indonesia yakni untuk meningkatkan pengaruh global dan melakukan diversifikasi terhadap kemitraan ekonominya, yang dapat mencerminkan aspirasinya untuk memainkan peran yang lebih menonjol dalam tata kelola global.⁶ Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, potensi keanggotaan Indonesia di BRICS dapat secara signifikan memengaruhi dinamika regional dan lanskap politik sehingga akan melahirkan ekonomi global yang lebih luas.⁷

BRICS telah berkomitmen untuk menciptakan sistem tata kelola ekonomi global yang lebih adil dan terbuka, mengurangi dominasi negara-negara Barat, serta melindungi kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia yang sebelumnya mengambil sikap berhati-hati dalam memutuskan bergabung dengan BRICS guna menjaga keseimbangan hubungan dengan blok Barat yang sesuai dengan prinsip politik bebas aktif, akhirnya memandang keanggotaan penuh sebagai langkah pragmatis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia melihat keanggotaan dalam BRICS sebagai penerapan dari politik luar negeri bebas aktif, tanpa berpihak dalam blok tertentu.⁸ Pada akhirnya, 6 Januari 2025 lalu, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, dapat memberikan peluang strategis juga tantangan dalam bidang ekonomi dan politik. Bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat membuka pasar baru, memperluas peluang ekspor, dan menarik investasi serta teknologi dari negara-negara bagian BRICS pada sektor energi, pertanian,

⁵ Muhammad Widi Azzaqi dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)", *Jurnal Sosial Teknologi* Vol. 6, No. 2 (2026): 480-495.

⁶ Asep Setiawan, "Indonesia's joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world", *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 3 (2025): 2075-2082.

⁷ A F Medina, "Indonesia Joins BRICS: Unlocking new economic opportunities", *ASEAN Briefing*, 2025, <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-joins-brics-unlocking-neweconomic-opportunities/>

⁸ Muhammad Widi Azzaqi dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)", *Jurnal Sosial Teknologi* Vol. 6, No. 2 (2026): 480-495.

dan digital.⁹ BRICS juga menggambarkan diri mereka sebagai pendukung negara-negara terbelakang dan berkembang.¹⁰

Negara-negara BRICS mewakili koalisi negara-negara berkembang yang telah menunjukkan adanya pertumbuhan dan pengaruh yang substansial di pasar global. Menurut Jakovljevic dkk (2019), negara-negara BRICS bersama dengan pasar negara berkembang lainnya, seperti Indonesia, akan diproyeksikan mendorong sebagian besar pertumbuhan PDB global. Pergeseran ini akan menuju tatanan dunia multipolar yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh ekonomi negara-negara berkembang yang akan menentang dominasi ekonomi barat.¹¹ Salah satu motivasi utama dan ketertarikan Indonesia terhadap BRICS adalah potensi peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Dalam hal ini, BRICS Development Bank yang bertujuan mendanai proyek infrastruktur pembangunan berkelanjutan, menghadirkan sejumlah peluang bagi Indonesia untuk mengamankan sumber daya keuangan bagi tujuan pembangunan negaranya sendiri.¹² Fokus bank tersebut juga pada kerja sama Selatan-Selatan yang sejalan dengan aspirasi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan Barat tradisional. Dalam hal ini, bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat memberikan manfaat keahlian dan sumber daya kolektif negara-negara anggota untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan secara keseluruhan.¹³

Di luar motivasi ekonomi, minat Indonesia terhadap BRICS juga didorong oleh pertimbangan politik yang strategis. Dalam hal ini, penyebaran kekuatan global telah menyebabkan konfigurasi ulang hubungan internasional, di mana negara-negara berkembang tengah berupaya untuk menegaskan pengaruh mereka di panggung global.¹⁴ Partisipasi Indonesia dalam BRICS akan meningkatkan kedudukan diplomatiknya dan dapat menyediakan platform untuk memperjuangkan

⁹ Surya Bakti dkk, "Indonesia dalam BRICS: Dampak bagi perekonomian nasional", *Kalianda Halok Gagah* Vol. 8, No. 1 (2025): 66-75.

¹⁰ Ngophisa Diko dan Norman Sempijja, "Does participation in BRICS foster South-South cooperation? Brazil, South Africa, and the Global South", *Journal of Contemporary African Studies* Vol. 39, No. 1 (2021): 151-167.

¹¹ Mihajlo Jakovljevic dkk, "Underlying Differences in Health Spending Within the World Health Organisation Europe Region-Comparing EU15, EU Post-2004, CIS, EU Candidate, and Carinfont Countries", *International Journal of Environmental Research and Public Health* Vol. 16, No. 17 (2019).

¹² Dan Banik dan Emma Mawdsley, "South-South Cooperation and global development in multipolar world: China and India in Africa", *Journal of International Development*, (2023).

¹³ Asep Setiawan, "Indonesia's joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world", *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 3 (2025): 2075-2082.

¹⁴ Asep Setiawan, "Indonesia's joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world", *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 3 (2025): 2075-2082.

kepentingan negara-negara berkembang. Lanskap geopolitik yang sedang bergeser, maka akan meningkatkan persaingan yang kuat antara kekuatan-kekuatan hegemoni yang besar.

Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pengaruh kekuatan Barat, yang memungkinkan Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam membentuk tata kelola global.¹⁵ Hal ini pun juga sejalan dengan tren masyarakat yang lebih luas di negara berkembang yang telah berupaya untuk mendefinisikan ulang norma dan praktik internasional, khususnya pada bidang perdagangan, investasi, dan perubahan iklim. Penekanan pada pembangunan berkelanjutan dalam kerangka BRICS juga selaras dengan agenda pembangunan Indonesia, yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial.¹⁶ Dalam partisipasi pada BRICS sendiri, Indonesia dapat memperoleh ulang manfaat dari berbagai pengetahuan dan praktik terbaik dalam pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak.

Penulisan penelitian ini dilandasi pada teori geopolitik yang menjadi dasar pembahasan yang bersifat general atau umum. Teori Geopolitik dapat diartikan sebagai bagaimana posisi sebuah negara dalam ranah internasional beserta dengan kedudukannya di dalam bentang geografis dalam memahami kebijakan nasional yang dianut. Selain itu, Fredrick Ratzel menyebutkan bahwa (1) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati, (2) kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya, (3) suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung, (4) apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang (Samsurizal et al., 2026).

Negara lahir, tumbuh, dan berkembang layaknya organisme. Jika ruang untuk bertumbuhnya tergolong kecil, maka organisme juga akan susah untuk berkembang dan sebaliknya jika ruang tergolong besar maka organisme tersebut akan lebih leluasa untuk berkembang. Pemahaman tersebut dimaknai sebagai ruang gerak dan bertumbuh bagi negara untuk dapat berkembang secara global atau mendunia. Dengan bergabungnya negara dengan berbagai organisasi di dunia, menjadikan sebuah negara tersebut dapat melakukan pergerakan yang luas baik

¹⁵ Asep Setiawan, "Indonesia's joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world", *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 3 (2025): 2075-2082.

¹⁶ Ce Mulya Rizki Anugrah dkk, "Building a Green Industry Based on the Sustainable Development Goals (SDGs) Reports of State-Owned Banks", *KnE Social Sciences* (2022): 460-470.

secara politik, ekonomi maupun kerja sama internasional. Melalui keikutsertaan dalam organisasi internasional, sebuah negara akan mendapatkan akses besar terhadap dunia global. Salah satunya dapat dilihat dari bagaimana Indonesia memilih BRICS sebagai tempat berkembang secara global. Dengan hadirnya Indonesia di BRICS, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk melakukan kerja sama guna memperkuat ekonomi dan berusaha untuk melemahkan kekuatan barat layaknya Amerika. Dengan begitu, Indonesia mampu memperkuat dan berkembang dengan meningkatkan diplomasi dan kolaborasi dengan baik.

Untuk mendukung penelitian, diperlukan kajian literatur sebagai bahan pendukung argumen. Penelitian yang berjudul "OPPORTUNITIES TO ADVANCE INDONESIA'S ECONOMY THROUGH THE OECD AND BRICS" yang ditulis oleh Aliah Rahmatulummah, Bagas Rizky Ramadhan, dan Inas Ilya pada tahun 2025 menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia kedalam BRICS menjadi salah satu strategi yang baik dalam memperkuat posisi ekonomi dan politik di dalam ranah global.¹⁷ Selain itu, bergabungnya Indonesia dengan OECD juga memberikan akses ke dalam praktik terbaik dan standar yang lebih global. Meskipun demikian, Indonesia harus tetap meningkatkan kualitas industri, SDM, dan juga daya saing produk agar bisa memanfaatkan kerja sama ini dengan baik.

Selain itu pemerintah juga dapat diharapkan dapat memberikan kebijakan yang melindungi para investor dan juga melindungi usaha dalam negeri. Selain itu, penelitian "Indonesia's Membership in BRICS: From Economic Growth Opportunities to Geopolitical Challenges" yang ditulis oleh Ferdian Ahya Al Putra, Muhammad Ali Akbar, dan Muhammad Ilham Aryaputra Sumarman menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan sebuah tonggak penting dalam kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi negara yang terus berkembang di tengah pergeseran konfigurasi kekuatan global.¹⁸

Meskipun demikian, Indonesia tetap menghadapi tantangan seperti bagainya Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan SDM dan mendukung peningkatan daya saing industrinya. Penelitian terakhir berjudul "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)" oleh Muhammad Widi Azzaqi, Yana Sutiana dan Budi Tresnayadi tahun 2026 membahas mengenai arah politik ekonomi Indonesia setelah bergabung menjadi anggota BRICS.¹⁹ Di dalam penelitian ini,

¹⁷ Aliah Rahmatulummah dkk, "OPPORTUNITIES TO ADVANCE INDONESIA'S ECONOMY THROUGH THE OECD AND BRICS", *Budi Labur Journal of Strategic & Global Studies*, Vol. 3, No. 1 (2025): 65-95.

¹⁸ Ferdian Ahya Al Putra dkk, "Indonesia's Membership in BRICS: From Economic Growth Opportunities to Geopolitical Challenges", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 2 (2025): 63-74.

¹⁹ Widi Azzaqi dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)", *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 6, No. 2 (2026): 480-495.

penulis berusaha mengungkapkan bagaimana peluang dan resiko dan bagaimana Indonesia bisa menerapkan prinsip keadilan dan kerjasamanya. Indonesia mulai condong terhadap model semi merkantilis untuk dapat mengejar kedaulatan ekonomi tetapi masih cukup bergantung dengan negara negara besar layaknya Cina.

Dalam menjelaskan bagaimana hubungan geopolitik yang terjadi antara Indonesia dengan BRICS, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif membantu peneliti untuk memahami bagaimana sebuah fenomena sosial dapat terjadi berdasarkan dengan perspektif individu atau kelompok. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan studi kasus yang merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk dapat mengkaji suatu kasus dengan cara yang spesifik, mendalam, dan juga kontekstual di dalam kehidupan yang nyata. Melalui studi kasus, peneliti dapat dengan mudah menangkap bagaimana fenomena sosial dapat terjadi berdasarkan pada dokumentasi yang memiliki fungsi penting melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulensi rapat, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menjabarkan bagaimana hubungan geopolitik yang terjadi antara Indonesia dan BRICS di ranah internasional.

Namun, masuknya Indonesia ke dalam BRICS berisiko menimbulkan ketergantungan baru jika tidak disertai dengan penguatan kapasitas nasional yang memadai. Dalam perspektif ekonomi politik, dengan bergabungnya dengan BRICS dapat berpotensi menggantikan ketergantungan pada Barat dengan ketergantungan pada kekuatan hegemoni lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap dapat dilakukan di tengah kecenderungan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan pemahaman implikasi keanggotaan BRICS bagi Indonesia sehingga masyarakat memahami kebijakan yang telah diterapkan pemerintah. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yakni bagaimana implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah diterapkan sejak dahulu di tengah eskalasi polarisasi dengan kekuatan Barat?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif menurut Creswell (2013) merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang digunakan guna memahami dan mencari makna mendalam dari suatu fenomena sosial yang ada berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, jenis penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dan juga kerangka interpretatif yang digunakan oleh peneliti untuk dapat menafsirkan secara jelas terkait dengan realitas sosial sehingga peran peneliti bukan hanya sebagai pihak yang

mengumpulkan data tetapi juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses interpretasi. Melalui pendekatan ini, pengumpulan data dilakukan dengan setting alami (*natural setting*), yaitu suatu kondisi dimana data yang ditemukan bersifat nyata tanpa adanya manipulasi sehingga fenomena yang dianalisis dapat dipahami sebagai suatu fenomena kontekstual. Kemudian, dalam pengumpulan datanya, kualitatif menghimpun data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen (e-book, jurnal digital, dan website resmi) yang didapatkan untuk selanjutnya dianalisis secara induktif dengan tujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut.

Tujuan utama dari pendekatan jenis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam (*in depth understanding*) terhadap suatu fenomena dan juga guna menampilkan perspektif dan pengalaman partisipan secara langsung melalui hasil penelitian²⁰. Dalam penelitian dengan judul “Analisis Kecenderungan Geopolitik Indonesia dalam Organisasi BRICS pada Perspektif Luar Negeri Bebas Aktif” yang diangkat oleh peneliti dalam proses penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan dinamika yang terjadi menyangkut dengan kecenderungan geopolitik Indonesia melalui keterlibatannya di dalam BRICS dan mengaitkannya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianalisis menggunakan Teori Geopolitik Friedrich Ratzel. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh karakteristik dari topik penelitian yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat diukur dengan statistik atau angka (kuantitatif), tetapi topik penelitian ini perlu untuk dipahami melalui interpretasi makna, kepentingan, dan juga interaksi antar aktor politik di dalam arena politik global.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terkait dengan posisi Indonesia di dalam dinamika geopolitik global yang berkembang secara dinamis, khususnya terkait BRICS yang merupakan kekuatan alternatif diluar dominasi Barat. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif dimaknai dan diimplementasikan oleh Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik global, dimana dalam hal ini diperlukan pemahaman yang dilakukan secara mendalam terkait dengan interaksi kepentingan global, tekanan global. dan juga posisi strategis Indonesia di kawasan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi pola hubungan, kepentingan, dan juga strategi politik yang tidak

²⁰ W. J. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2013).

selalu terlihat secara nyata, tetapi dituangkan melalui analisis kritis menggunakan data yang ada.

Selanjutnya, dalam jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk dapat mengkaji suatu kasus dengan cara yang spesifik, mendalam, dan juga kontekstual di dalam kehidupan yang nyata. Menurut Creswell (2013), studi kasus merupakan suatu jenis penelitian yang berfokus pada kasus dengan batasan yang jelas (bounded system) di dalam waktu, tempat maupun konteks tertentu. Melalui jenis penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam dan mendapatkan pemahaman terkait dengan kompleksitas fenomena yang terjadi dengan melakukan eksplorasi secara detail dan menyeluruh.

Selain itu, jenis penelitian studi kasus sangat menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan historis untuk dapat memahami fenomena yang sedang dijadikan topik penelitian. Oleh karena itu, studi kasus tidak mengarah pada generalisasi secara luas, tetapi terkait dengan pemahaman secara mendalam terkait fenomena tertentu yang dianggap penting dan representatif untuk diteliti²¹. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam dan mendapatkan informasi terkait dengan kecenderungan geopolitik Indonesia di dalam BRICS dari kacamata perspektif luar negeri bebas aktif.

Dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, peneliti didasari oleh kebutuhan dalam mengkaji fenomena ini secara mendalam, khususnya posisi Indonesia di dalam BRICS merupakan suatu isu yang kompleks dengan berbagai faktor. Penggunaan jenis penelitian studi kasus memberikan ruang bagi para peneliti untuk dapat mendeskripsikan fenomena yang dikaji serta melakukan analisis dan juga menafsirkan kecenderungan geopolitik Indonesia secara kritis dan mendalam. Oleh karena itu, melalui pendekatan penggunaan studi kasus di dalam penelitian dianggap tepat untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik penelitian, peneliti memilih menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi memegang fungsi penting yang didapatkan dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulensi rapat, dan

²¹ W. J. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2013).

sebagainya. Di dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik pengumpulan data dokumentasi dinilai lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini terjadi karena jika terdapat suatu kekeliruan, maka sumber data tetap ada dan tidak mengalami perubahan (Safitri, dkk, 2024). Dokumentasi datang dari kata “dokumen” yang artinya merupakan tulisan atau benda mati dalam bentuk teks. Menurut para ahli, terdapat dua pemahaman terkait dengan dokumen, yaitu, pertama dokumen merupakan sumber tertulis yang memiliki informasi bersejarah dan kedua dokumentasi dapat berbentuk surat menyurat resmi dan naskah kenegaraan (undang-undang, perjanjian, hibah, konsesi, dan dokumen lainnya yang dianggap sebagai dokumen) (Sofian dan Syafrizal, 2024 di dalam Safitri, dkk, 2024).

Dalam mengumpulkan data guna menjawab topik penelitian yang diangkat oleh peneliti, proses pengambilan data melalui dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan. Analisis yang dilakukan oleh para peneliti terkait dengan kondisi geopolitik Indonesia dan BRICS membutuhkan dokumen resmi yang tersedia dari website resmi BRICS dan kenegaraan Indonesia yang berupa produk hukum (undang-undang) atau pernyataan resmi serta laporan organisasi internasional. Selain itu, laporan media massa yang akurat dan konkret juga memiliki peran dalam penelitian ini guna menghimpun data yang kredibel dan akuntabel serta memberikan tujuan untuk memperkuat data dan memberikan konteks historis serta kebijakan.

3. Studi Literatur

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi literatur dalam menghimpun data. Menurut Pan (2017) studi literatur merupakan suatu proses kajian ilmiah dengan tujuan untuk menelaah, mengevaluasi, dan juga mengaitkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian. Dalam hal ini, fungsi studi literatur bukan hanya untuk menghimpun informasi yang didapatkan dari dokumen atau tulisan sebelumnya, tetapi juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai temuan, ide, dan hasil penelitian sebelumnya yang beragam. untuk dapat menghasilkan suatu pemahaman yang komprehensif terkait suatu bidang kajian. Dengan demikian, studi literatur memiliki fungsi sebagai upaya guna menyusun gambaran struktur terkait dengan suatu pengetahuan atau temuan yang telah ada sebelumnya (stage of knowledge) terkait topik tertentu.

Studi literatur menjadi bagian yang bersifat krusial di dalam topik penelitian ini karena topik ini membutuhkan landasan teoritis dan berbasis dengan kebijakan global sehingga membutuhkan landasan teoritis dan empiris yang kuat. Dengan menggunakan

studi literatur, peneliti dapat menelaah berbagai konsep serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dapat menjadi dasar guna memahami posisi Indonesia pada skala global. Dalam hal ini, fungsi studi literatur dapat membantu peneliti dalam menghimpun data melalui temuan, teori, dan gap penelitian yang telah ada pada penelitian sebelumnya untuk membantu peneliti dalam menemukan temuan baru dan juga memperkuat argumentasi penulis melalui data sekunder yang dihasilkan melalui e-book dan jurnal digital yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengusung teknik model analisis interaktif yang dipopulerkan oleh Matthew B. Mies da A. Michael Huberman. Model ini menekankan adanya proses analisis data yang dilakukan secara terus-menerus dan berkaitan sejak awal hingga akhir. Menurut mereka, dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur utama dalam prosesnya, yaitu: (1) Reduksi data (Data Reduction) yang merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan juga transformasi dari data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini terjadi seleksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian agar data yang didapatkan dapat disederhanakan dengan tidak menghilangkan data utamanya.

Selama proses penelitian berlangsung, reduksi data dilakukan secara berkala baik sebelum maupun sesudah terkumpulnya data yang didapatkan. (2) Penyajian data (Data Display) merupakan sebuah proses penyusunan dan juga pengorganisasian data dalam bentuk yang lebih sistematis untuk dapat memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis informasi yang disajikan melalui bentuk narasi, deskriptif, tabel, matrik, atau struktur yang disediakan oleh peneliti untuk dapat melihat suatu pola, hubungan, dan kecenderungan tertentu guna menarik makna dari data yang telah dihimpun. (3) Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing) adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang berbasis data analisis. Kesimpulan dari hasil penelitian kualitatif pada awalnya memang bersifat sementara. tetapi setelah melewati proses verifikasi secara terus menerus peneliti akan mengecek kembali data, membandingkan temuan, dan juga memastikan konsistensi informasi sebelum penarikan kesimpulan dilakukan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Luar Negeri Indonesia dan Lanskap Geopolitik Global

Dalam menjalankan suatu negara, pemerintah memiliki suatu kebijaksanaan yang telah disepakati suatu negara serta ditetapkan dalam mengatur hubungan dengan negara lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalani kepentingan nasional. Kumpulan kebijakan tersebut dalam kata lain juga dapat disebut sebagai politik luar negeri atau politik nasional. Secara singkat, politik luar negeri merupakan suatu strategi yang digunakan negara guna melaksanakan kepentingan nasional atau tujuan negara yang berkaitan dengan negara lain.²² Politik luar negeri bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Sutan Sjahrir pada tahun 1947 di New Delhi dalam *Inter Asia Relations Conference*.

“Dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antara kekuatan yang saling bermusuhan sekarang: antara blok Anglo-Saxon dan Soviet Rusia. Tetapi kita secara benar menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud internasional yang sesuai dengan kehidupan interen kita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan kita dan tentu saja tidak ke dalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita.” (Deplu, 1996:388 di dalam Haryanto, 2014)

Melalui pernyataan tersebut, Sjahrir memberikan isyarat terkait dengan kebebasan sikap untuk dapat lepas dari sistem yang tidak sejalan dengan dasar konstitusi. Selain itu, pernyataan tersebut juga sesuai dengan apa yang sedang terjadi di masa itu, dimana dua kekuatan besar dunia yaitu Blok Soviet dan Blok Sekutu saling bersaing untuk dapat memperebutkan pengaruh. Terlebih lagi pada saat itu, Indonesia merupakan negara yang baru saja merdeka. Artinya, sangat cocok bagi negara baru dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan juga pembangunan dengan menanamkan modal pada negara-negara besar. Oleh karena itu, Indonesia saat itu menghadapi godaan besar untuk bergabung ke dalam salah satu blok.²³ Selanjutnya, sejak tanggal 2 September 1948 negara ini telah menetapkan politik luar negeri mereka yaitu bebas aktif. Pilihan ini disampaikan melalui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Selain itu, sikap Indonesia dalam memilih politik luar negeri juga dipertegas dengan pernyataan Drs. Moh. Hatta. Beliau menegaskan bahwa perjanjian politik ini bertujuan untuk menjaga kemerdekaan bangsa dan juga menjaga keselamatan negara, mendapatkan distribusi yang belum dihasilkan di Indonesia dari luar, meningkatkan perdamaian internasional untuk menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera, dan mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub

²² Baiq Giri Sekar Katon, *Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019), 2-6.

²³ Agus Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi* Vol. 4, No. 2 (2014): 22-24.

di dalam Pancasila dan juga falsafah negara Indonesia. Secara garis besar, Politik Luar Negeri Bebas Aktif dapat diartikan bahwa Indonesia secara bebas dapat menentukan akan melakukan hubungan negara mana pun dengan tidak dibatasi melalui hubungan dengan bangsa Eropa atau bangsa Timur saja. Artinya, Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa di Indonesia. Kemudian, Indonesia secara aktif dapat terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia untuk membantu negara-negara yang terjajah agar terbebas dari penjajahan. Perwujudan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dapat dilihat melalui kegiatan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan mendirikan gerakan Non-blok.²⁴

BRICS merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini sejak lama telah dinilai sebagai bentuk dari kekuatan baru dalam peta politik dan ekonomi global. Dalam kacamata ekonomi, asosiasi ini dinilai mampu mewakili lebih dari 40% populasi dunia. Selain itu, mereka juga mampu menyumbang sekitar sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) global. Kemudian, dilihat dari kacamata politik, BRICS dianggap memiliki peran penting dalam menyeimbangkan dominasi kekuatan barat serta menjadi pendorong dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih menyeluruh di tengah dominasi negara-negara Barat²⁵. Istilah BRICS pertama kali muncul diperkenalkan oleh ekonom bernama Goldman Sachs, Jim O'Neill pada tahun 2001 melalui penelitian mereka dengan judul *Building Better Global Economic BRICs* yang dianggap sebagai suatu konsep ekonomi. Melalui penelitian tersebut, O'Neill menyebutkan bahwa terdapat empat negara berkembang yaitu Brasil, Rusia, India, dan China dengan potensi tinggi yang diperkirakan mampu mendominasi ekonomi global jika mereka berhasil untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

Selanjutnya, pada tahun 2006 terdapat pertemuan secara informal para pemimpin BRIC untuk pertama kalinya di St. Petersburg, Rusia di sela-sela pelaksanaan KTT G8. Pada pertemuan ini, dilakukan pertemuan tingkat menteri pertama dari usulan Presiden Rusia yang pada saat itu dipimpin oleh Vladimir Putin pada Sidang Majelis Umum PBB di bulan September pada tahun yang sama. 16 Juni 2009, diadakan KTT BRIC pertama di Yekaterinburg, Rusia yang menghasilkan pernyataan untuk memperkuat kerjasama mereka. Disini, mereka menyepakati tujuan dari pembentukan BRIC adalah untuk mempromosikan dialog, kerja sama, serta juga mempererat hubungan internasional secara bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan. Tahun 2010, Afrika Selatan kemudian diundang untuk bergabung dengan BRIC. Saat itu BRIC juga mengalami

²⁴ Baiq Giri Sekar Katon, Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019), 2-6.

²⁵ Rehan Oktra Halim, BRICS: Sejarah dan Perkembangan Keanggotaannya, 6 Juli 2025, <https://www.tempo.co/internasional/brics-sejarah-dan-perkembangan-keanggotaannya-1915302>.

perubahan nama menjadi BRICS pada pertemuan ketiga mereka di Hainan, China pada bulan April 2011. Hadirnya Afrika Selatan dinilai mampu menjadi perwakilan dari kawasan utama dunia yang meliputi Amerika Selatan, Eropa Timur, Asia Selatan, Asia Timur, dan Afrika. Seiring dengan berjalannya waktu, koalisi ini terus mengembangkan serta memperkuat posisi mereka di dalam ekonomi global dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin, pembentukan NEw Development Bank, dan juga melakukan kerja sama lintas sektor²⁶.

Pada tahun 2023 BRICS secara resmi mengumumkan penambahan enam negara sebagai anggota baru mereka meliputi Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina. Namun, Argentina memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dilantiknya presiden baru mereka, yaitu Javier Milei. Saat ini, berdasarkan dari situs resmi BRICS, kelompok mereka beranggotakan sebelas negara meskipun Arab Saudi belum menyelesaikan proses keanggotaannya secara formal hingga kini. Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS²⁷. Meskipun perluasan keanggotaan ini mempertegas posisi BRICS sebagai kekuatan geopolitik tandingan Barat, langkah Indonesia untuk bergabung penuh dengan BRICS tentunya menjadi sebuah diskusi yang menarik. Keputusan Indonesia menjadi ujian sekaligus pembuktian terhadap konsistensi prinsip politik luar negeri yang dianutnya, yaitu Politik Bebas Aktif.

Indonesia dalam Keanggotaan BRICS: Kepentingan, Implikasi, dan Prospek Strategis

Keputusan Indonesia dalam keanggotaan penuh dengan BRICS tidak hanya dapat dipandang semata-mata sebagai diplomasi politik dalam ekonomi atau sebagai strategi geopolitik jangka pendek. Hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum negara Indonesia sebagai respons atas tantangan terhadap perubahan tatanan internasional yang semakin berkembang.²⁸ Dalam hal ini, kebijakan hukum dapat berfungsi sebagai kerangka kerja politik yang dapat menentukan bagaimana undang-undang baik dalam tingkat nasional maupun internasional harus diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam BRICS sendiri bukanlah suatu hal yang didirikan sendiri, melainkan sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum Indonesia baik dalam bidang hubungan luar negeri, perjanjian internasional, dan pengelolaan kerja sama ekonomi global. Sebagai sebuah negara yang memiliki komitmen pada prinsip kebijakan politik luar negeri bebas

²⁶ Nur Jamal Shaid, Apa itu BRICS: Sejarah, Tujuan, dan Negara yang Sudah Bergabung, 26 Oktober 2024, [Apa Itu BRICS: Sejarah, Tujuan, dan Negara yang Sudah Bergabung](#).

²⁷ Rehan Oktra Halim, BRICS: Sejarah dan Perkembangan Keanggotaannya, 6 Juli 2025, <https://www.tempo.co/internasional/brics-sejarah-dan-perkembangan-keanggotaannya-1915302>.

²⁸ Muhammad Widi Azzaqi dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)", *Jurnal Sosial Teknologi* Vol. 6, No. 2 (2026): 480-495.

aktif, Indonesia secara hukum berkewajiban dalam menjaga keseimbangan antara partisipasi aktif dalam forum Internasional dan perlindungan kepentingan nasionalnya. Hal ini juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menetapkan bahwa segala bentuk kerja sama internasional yang dilakukan harus berdasar pada kepentingan bangsa, dengan aspek kesetaraan dan kesejahteraan rakyat.²⁹

Ketertarikan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS mencerminkan adanya interaksi kompleks antara aspirasi ekonomi, pertimbangan geopolitik, juga keinginan untuk meningkatkan kedudukan Indonesia dalam kancah global. Melihat lebih jauh, motivasi utama Indonesia dalam mempertimbangkan keanggotaan BRICS tampaknya dapat dilihat dari sektor ekonomi. Indonesia telah melihat potensi manfaat yang besar dalam menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara berkembang lainnya, khususnya dalam peluang untuk perdagangan dan investasi.³⁰ Negara-negara BRICS terutama Tiongkok, sudah menjadi mitra ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dalam hal ini, perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS terus menunjukkan sisi positif yang signifikan dengan didorong oleh kuatnya volume ekspor-impor komoditas utama ke Tiongkok dan India. Integrasi pasar ini menempatkan BRICS sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia yang mampu mengimbangi dominasi pasar negara Barat.³¹

Kepentingan Indonesia dalam BRICS juga beragam, yang memberikan dampak yang signifikan terutama dalam kebijakan ekonomi domestik di Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat berpengaruh terhadap kebijakan fiskal dan moneter terutama untuk mengarahkan perekonomian kepada pertumbuhan berkelanjutan melalui cadangan devisa negara dengan memainkan peran kunci ekspor barang dan jasa.³² Layanan-layanan tersebut dapat mendorong perekonomian negara dengan memperkuat posisi keuangannya dalam pasar internasional sehingga dapat menjadi faktor dalam memperkuat hubungan global dalam integrasi pasar.³³

²⁹ Muhammad Widi Azzaqi dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)", *Jurnal Sosial Teknologi* Vol. 6, No. 2 (2026): 480-495.

³⁰ Anum Intan Maulidi dan Virdika Rizki Utama, "Indonesia; BRICS Bet", *Stratsea*, 2024, <https://stratsea.com/indonesias-brics-bet/>

³¹ Chanif Ainun Naim dan Fitriatul Hasanah, "Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World", *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* Vol. 13, No. 1 (2024): 80.

³² Alia Rahmatulummah dkk, "Opportunities To Advance Indonesia's Economy Through the OECD and BRICS", *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies* Vol. 3, No. 1 (2025): 65-95.

³³ Dwi Mahriun dan Dewi Zaini Putri, "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 2, No. 3 (2020): 25-32.

Selain itu, integrasi ini juga dapat memperluas sumber pendanaan Indonesia melalui pemanfaatan mekanisme pendanaan kreatif yang lebih multilateral sehingga Indonesia akan memiliki kebebasan yang lebih besar dalam merancang kebijakan dan dapat mendiversifikasi sumber pendanaan sehingga mengurangi risiko dependensi tunggal pada negara Barat.³⁴ Selain itu, kepentingan ini dapat merubah posisi Indonesia dalam kancah internasional. BRICS menawarkan Indonesia sebuah wadah untuk memperkuat pengaruh politiknya, terutama dalam hal memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional. Kolaborasi ini dapat membuka peluang besar bagi Indonesia dalam mendorong keseimbangan ekonomi dan politik dalam sistem multilateral yang lebih inklusif. Selain itu, penguatan peran Indonesia dalam BRICS sendiri secara strategis dapat mendongkrak daya tawar dan posisi diplomasi Indonesia dalam forum internasional seperti PBB, G20, dan ASEAN.³⁵

Dalam hal ini, minat Indonesia terhadap BRICS bukan hanya bersifat ekonomi tetapi juga geopolitik. BRICS kerap dipandang sebagai kelompok “revisionis” yang berupaya menantang tatanan global yang didominasi oleh barat. Bagi Indonesia sendiri, bergabungnya dengan BRICS dapat dilihat sebagai peluang untuk mendiversifikasi kemitraan internasionalnya dan mengurangi ketergantungan pada lembaga yang dipimpin oleh Barat.³⁶ Namun, langkah ini membawa risiko geopolitik yang signifikan terhadap Indonesia dalam BRICS, terutama mengingat ketegangan Rusia dan Amerika Serikat (AS) terkait konflik Ukraina sehingga hal ini dapat memperketat hubungan Indonesia dengan AS.³⁷ Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dengan politik bebas aktif mungkin akan terancam oleh keanggotaan BRICS, karena dapat dianggap memihak dalam persaingan yang semakin meningkat antara AS dan Tiongkok. BRICS bukanlah sebuah kelompok homogen, terlebih dengan adanya ketegangan antara anggotanya seperti sengketa teritorial antara China dan India sehingga dapat mempersulit posisi diplomatik Indonesia dan berpotensi dalam membatasi efektivitas kelompok tersebut sebagai blok yang bersatu.³⁸

³⁴ Surya Bakti dkk, “Indonesia dalam BRICS: Dampak bagi perekonomian nasional”, *Kalianda Halok Gagas* Vol. 8, No. 1 (2025): 66-75.

³⁵ Surya Bakti dkk, “Indonesia dalam BRICS: Dampak bagi perekonomian nasional”, *Kalianda Halok Gagas* Vol. 8, No. 1 (2025): 66-75.

³⁶ Victor Ardian Sandi Braviano dan Guruh Heriantomo, “Prospek Mata Uang BRICS dan Korelasinya Terhadap Potensi Keamanan Ekonomi di Indonesia”, *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No. 2 (2024): 304-321.

³⁷ Yohanes Sulaiman, “Indonesia and BRICS: Will It Stack Together?”, *RSIS*, 2024, <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24088-indonesia-and-brics-will-it-stack-together/>

³⁸ Gufron Gozali dan M. Habib Pashya, “Joining BRICS+ is not in Indonesia Interest”, *Lowy Institute*, 2024, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/joining-brics-not-indonesia-s-interests>

Hal ini juga menunjukkan bahwa keputusan Indonesia dalam keanggotaan BRICS akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik yang lebih luas, termasuk hasil pemilihan presiden AS pada 2024 dan evolusi hubungan AS-Tiongkok. Dalam hal ini, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono, telah menyatakan antusiasme untuk bergabung dengan BRICS, namun penasihat ekonomi utama juga telah menunjukkan kehati-hatian yang lebih besar. Debat ini mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga menunjukkan bahwa adanya minat dalam memperluas pengaruh global dalam ekonomi, namun juga pengakuan akan perlunya mempertahankan fleksibilitas strategis dan menghindari komitmen berlebihan dalam satu blok tunggal.³⁹

Adanya potensi Indonesia dalam memainkan peran sebagai jembatan penghubung antara BRICS dan lembaga-lembaga yang dipimpin Barat. Dalam hal ini, beberapa analis juga berpendapat bahwa partisipasi Indonesia dalam BRICS dapat memberikan kesempatan untuk memoderasi sikap kelompok yang lebih konfrontatif dan memfasilitasi dialog antara BRICS dan negara-negara Barat. Melihat dari perspektif geopolitik, minat Indonesia bergabung dalam BRICS mencerminkan sebagai upaya dalam perlindungan strategis yang dilakukan di tengah pergeseran tatanan dunia yang menuju multipolaritas. Pada kerangka teori neoralisme yang berkembang menurut Kenneth Waltz (1979), neoralisme atau realisme merupakan praktik politik internasional yang memperhatikan aspek penting seperti struktur internasional seperti struktur anarki, aktor negara, persaingan kekuasaan, *self-help*, kepentingan nasional, dan *balance of power*.⁴⁰

Dalam hal ini bagi Indonesia, langkah tersebut merupakan sebuah strategi upaya pragmatis untuk mendiversifikasi kemitraan internasional, mengurangi ketergantungan pada lembaga Barat, juga mengamankan kepentingan nasional ditengah ketidakpastian sistem internasional tanpa harus terlibat dalam aliansi formal. Selain itu, dengan karakter Indonesia yang berasaskan non-blok memberikan legitimasi untuk memoderasi kecenderungan dalam BRICS. Indonesia juga dapat berpotensi memfasilitasi dialog antara BRICS dengan negara Barat yang berfokus pada reformasi tatanan global, bukan pembentukan blok geopolitik yang destruktif.

Ambisi Indonesia dalam keanggotaan BRICS juga harus diimbangi dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif khususnya dalam komitmen terhadap non-blok dan otonomi strategis. Politik luar negeri bebas aktif telah menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan sehingga memungkinkan negara untuk menavigasi dinamika internasional yang

³⁹ Asep Setiawan, "Indonesia's joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world", *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 3 (2025): 2075-2082.

⁴⁰ Munafrizal Manan, "Realisme dalam Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2015

kompleks tanpa menjadi terlalu bergantung pada satu kekuatan atau blok tertentu.⁴¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar seperti “apakah Indonesia mempertahankan otonomi strategisnya antara BRICS dan dominasi Barat?”. Pertanyaan ini dapat merelevansikan persepsi BRICS sebagai penyeimbang terhadap lembaga internasional yang didominasi Barat. Di satu sisi, keselarasan lebih dekat dengan BRICS khususnya Tiongkok, menawarkan potensi manfaat ekonomi melalui peningkatan peluang dan investasi. Di sisi lainnya, keselarasan tersebut dapat membawa risiko geopolitik yang berpotensi memperketat hubungan dengan mitra Barat dan mempersulit posisi strategis Indonesia.⁴² Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS akan secara berkala dipantau dengan cermat sebagai indikator bagaimana negara berkembang dapat menavigasi kompleksitas dari persaingan kekuatan yang besar.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS merupakan suatu langkah strategis dalam memperluas kerjasama ekonomi, meningkatkan posisi tawar dalam sistem internasional, dan memperkuat pengaruh Indonesia di tengah tatanan geopolitik yang semakin multipolar. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi merupakan hasil pertimbangan geopolitik untuk dapat memperluas hubungan internasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap institusi yang didominasi oleh negara-negara barat. Meskipun demikian, keanggotaan Indonesia di dalam BRICS juga memunculkan tantangan terkait dengan konsistensi negara dalam mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi landasan diplomasi Indonesia.

Hal ini dapat menciptakan adanya potensi keberpihakan Indonesia dalam rivalitas kekuatan besar. Oleh karena itu, politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam menghindari adanya keberpihakan pada blok tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BRICS dianggap sebagai bentuk diplomasi ekonomi dan juga strategis geopolitik yang berjalan sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam hal ini, Indonesia berpotensi untuk memainkan perannya sebagai jembatan dialog antara BRICS dengan negara-negara Barat guna mendorong adanya tata kelola global yang lebih inklusif, seimbang, dan berkeadilan untuk negara-negara berkembang.

⁴¹ Yohanes Sulaiman, “Indonesia and BRICS: Will It Stack Together?”, *RSIS*, 2024, <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24088-indonesia-and-brics-will-it-stack-together/>

⁴² Asep Setiawan, “Indonesia’s joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world”, *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 3 (2025): 2075-2082.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Anugrah, C. M. R., Wulandari, R., & Hamidi, D. Z. (2022). Building a Green Industry Based on the Sustainable Development Goals (SDGs) Reports of State-Owned Banks. *KnE Social Sciences*, 460–470.
- Asian Development Bank. (2022, 6 April). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Menguat Pada 2022, 2023 — ADB. Diakses pada 15 April 2026, dari <https://www.adb.org/id/news/indonesia-economic-growth-strengthen-2022-2023-adb>
- Azzaqi, M. W., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2026). Tinjauan Siyasa Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 480-495.
- Bakti, S., Hakim, L. N., & Marpaung, D. (2025). Indonesia dalam BRICS: Dampak bagi perekonomian nasional. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 66-75.
- Banik, D., & Mawdsley, E. (2023). South–South Cooperation and global development in a multipolar world: China and India in Africa. *Journal of International Development*.
- Braviano, V. A. S., & Heriantomo, G. (2024). Prospek Mata Uang BRICS dan Korelasinya Terhadap Potensi Keamanan Ekonomi di Indonesia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 304-321.
- Diko, N., & Sempijja, N. (2021). Does participation in BRICS foster South-South cooperation? Brazil, South Africa, and the Global South. *Journal of Contemporary African Studies*, 39(1), 151–167. <https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1837746>
- Gozali, G., & Pashya, M. H. (2024, 26 November). Joining BRICS+ is not in Indonesia's interests. Lowy Institute. The Interpreter. Diakses pada 25 Mei 2026, dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/joining-brics-not-indonesia-s-interests>
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(02).
- Jakovljevic, M., Fernandes, P. O., Teixeira, J. P., Rancic, N., Timofeyev, Y., & Reshetnikov, V. (2019). Underlying Differences in Health Spending Within the World Health Organisation Europe Region-Comparing EU15, EU Post-2004, CIS, EU Candidate, and CARINFONET Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(17). <https://doi.org/10.3390/ijerph16173043>
- Katon, B. G. S. (2019). Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia.

- Kompas.com. (2025, 8 Januari). Apa itu BRICS: Sejarah, tujuan, dan negara yang sudah bergabung.
- Mahriun, D., & Putri, D. Z. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 25-32.
- Maulidi, A. I., & Utama, V. R. (2024, 14 November). Indonesia's BRICS Bet. Diakses pada 26 Mei 2026, dari <https://stratsea.com/indonesias-brics-bet/>
- Miles, B. M. & Huberman, M. A. (1994). *An Expanded Sourcebook-Qualitative Data Analysis* (Second Edition). SAGE Publications.
- Medina, A. F. (2025, n.d.). Indonesia joins BRICS: Unlocking new economic opportunities. ASEAN Briefing. Diakses pada 15 April 2026, dari <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-joins-brics-unlocking-neweconomic-opportunities/>
- Naim, C. A., & Hasanah, F. (2024). Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 13(1), 80. <https://doi.org/10.25077/ajis.13.1.80-90.2024>
- Pan, L. M. (2017). *Preparing Literature Reviews-Qualitative and Quantitative Approaches* (5th edition). Routledge.
- Creswell, W. J. (2013) *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches* (Third Edition). SAGE Publications.
- Rahmatulummah, A., Ramadhan, B. R., & Naura, I. A. (2025). Opportunities To Advance Indonesia's Economy Through the OECD and BRICS. *Budi Labur Journal of Strategic & Global Studies*, 3(1), 65-95.
- Safitri, F., dkk (2024). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*. CV LAUK PUYU PRESS.
- Samsurizal, R., Wibisono, A. A., & Ras, A. R. (2026). Implikasi Perkembangan Geopolitik Kawasan Indo-Pasifik Terhadap Keketuaan Indonesia di Asean 2023. *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 223–231. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5280>
- Setiawan, A. (2025). Indonesia's joins BRICS: balancing economic opportunities and geopolitical challenges in a multipolar world. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2075-2082.

- Sulaiman, Y. (2024, 29 Oktober). Indonesia and BRICS: Will It Stack Together?. Diakses pada 26 Mei 2026, dari <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24088-indonesia-and-brics-will-it-stack-together/>
- Tempo.co. (2025, 7 Januari). BRICS: Sejarah dan perkembangan keanggotaannya.
- Samsurizal, R., Wibisono, A. A., & Ras, A. R. (2026). Implikasi Perkembangan Geopolitik Kawasan Indo-Pasifik Terhadap Keketuaan Indonesia di Asean 2023. SENTRI Jurnal Riset Ilmiah, 5(1), 223–231. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5280>